POLITIK PENDIDIKAN ATAU PENDIDIKAN TAK BERPOLITIK?

Ahmad Baedowi



M. SIROZI, Ph.D.

Judul: Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan kekuasaan dan praktik Penyelenggaraan Pendidikan

Penulis: M. Sirozi, Ph.D

Penerbit: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005

Jumlah halaman: 268 + xviii

Pendahuluan

"We can't ignore the effects of politics and poverty on education", begitu kata Insiath Groome, seorang wartawan keturunan Indian di USA yang memenangi anugrah wartawan terbaik peliput ketertinggalan pendidikan suku-suku Indian di Amerika Serikat. Dan kalimat serupa dan seirama juga merupakan

pernyataan khas para pegiat dan praktisi pendidikan yang kritis terhadap perkembangan dunia pendidikan di masing-masing negaranya, termasuk negara-negara maju. Pendidikan merupakan kata kunci paling efektif untuk melihat ukuran kemajuan dan kemunduran sebuah negara, terutama dari bagaimana cara masyarakat dan negara mengelola sistem pendidikan

mereka sendiri. Dan politik pendidikan memang harus ditempatkan dalam kerangka bagaimana negara mengelola sistem pendidikan yang mereka anut dan jalankan sesuai dengan visi politik pemerintah.

Dalam perkembangan dunia pendidikan di Amerika dan Eropa sebagaimana digambarkan dalam buku Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan karya M. Sirozi, Ph.D., dalam hemat Saya, politik pendidikan harus dilihat sebagai disiplin ilmu "pemantasan" melalui interaksi antara kebutuhan politik sebagai ilmu dan praktek berpolitik, serta wacana pendidikan sebagai argumen untuk berpolitik. Di dalamnya akan terdapat banyak sekali isu yang menyangkut bagaimana pendidikan dikembangkan, dikelola, dan dijadikan isuisu yang bersifat politis dan praktis. Biasanya isu-isu tersebut menyangkut isu kemiskinan (poverty), ras, kultural, agama, peran negara dan hal-hal teknis yang menyangkut pendidikan itu sendiri seperti pengawasan pendidikan, kurikulum, administrasi sekolah dan sebagainya. Dalam banyak kasus di Amerika Serikat, Politik Pendidikan adalah cara bagaimana komunitas sekolah melihat hubungan antara isu-isu ras dalam sekolah dengan semangat membuat dan menerapkan kurikulum berdasarkan kepentingan golongan tertentu, sehingga dualisme pandangan terhadap performance pendididikan juga terus berlangsung. Stereotipe seperti ini bisa dilihat dari gambaran Jane McDonald (2001) mengenai perkembangan pendidikan di Amerika:

"There are conflicting left perspectives on public education. One view says that better, more democratic educational institutions are the key to solving a host of problems from economic opportunity to racial justice. Another view says that schools are servants of existing privilege, a large sifting and labeling operation that recreates and reinforces hierarchies of race, class and gender with no interest in providing educational excellence for all".

Paragraf di atas menggambarkan kepada kita bahwa di satu pihak pendidikan secara demokratis memberikan peluang untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dan keadilan rasial (sosial), tetapi di lain pihak pendidikan justru meneruskan tradisinya dalam menumbuhkan kembali hak-hak privasi golongan, kelas dan ras tertentu untuk mendapatkan posisi yang lebih baik. Untuk kasus Indonesia, pandangan mana yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia? Untuk menjawab satu contoh kasus pandangan seperti inilah diperlukan sebuah analisis komprehensif, di mana Politik Pendidikan diharapkan dapat membantu secara metodologis menjawab isu-isu tersebut.

Di samping itu, dalam pengertian yang sederhana, disiplin terbaru bidang politik pendidikan juga menangani dan mendiskusikan sekaligus menganalisis proses penetapan kebijakan pendidikan dan menempatkannya di dalam wilayah publik (public space) yang sangat terbuka untuk didebat dan dipersoalkan. Fokusnya terutama dan biasanya adalah isu-isu menyangkut teknis pendidikan dan bagaimana menangani persoalan tersebut pada semua level; sekolah, masyarakat, eksekutif dan legislatif. Politik pendidikan, dengan demikian, selalu berhubungan dengan kebijakan publik (public policy) yang disusun dan dibuat oleh pemerintah. Dalam kerangka ini sebenarnya Politik Pendidikan menjadi suatu subjek menarik sebagai sebuah disiplin ilmu.

Sistem Nilai dan Kebijakan Pendidikan: Pengalaman Amerika

Para pengamat sosial dan ahli pendidikan telah lama menyadari terjadinya perdebatan tentang hubungan antara nilai dan kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Alexis de Tocqueville dalam "curious contradictions" (dikutip dari Wirt & Kirst, 1989, p. 79). menganggap bahwa pertentangan soal kebijakan selalu berhubungan dengan jaminan persamaan hak dan dalam rangka "melindungi" para budak dari status quo mereka.

Easton adalah sarjana pertama dalam ilmu politik modern yang secara tegas mengeksplorasi hubungan antara nilai dan kebijakan publik. Easton mendefinisikan kebijakan sebagai "a web of decisions and actions that allocate values" (1953, p. 130); serta mengembangkan pendekatan sistemik untuk memahami hubungan antara orangperorang, konteks sosial dan proses politik yang terjadi dalam suatu negara. Easton (1965) menggambarkan sistem politik sebagai "patterns of interaction through which values are allocated for society" (p. 57).

Sepanjang tahun 1970 sampai dengan awal tahun 1980, para ahli ilmu politik terus melakukan analisis terhadap interaksi antara nilai dan kebijakan. Dye (1972) menulis bahwa perilaku kebijakan selalu bermula dan berasal dari pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat normatif dan mengandung nilai-nilai tertentu. Melihat apa yang telah dilakukan oleh para ahli ilmu politik tersebut yang berkaitan

dengan masalah nilai dan kebijakan publik, Wirt (1989, dikutip dalam Benham & Heck, 1994) menyatakan bahwa area untuk memahami hubungan antara budaya, politk dan struktur organisasi dan pengaruhnya terhadap konflik yang berlangsung di dunia pendidikan sesungguhnya merupakan hal baru dalam ranah Politik Pendidikan di Amerika. Karena itu dibutuhkan banyak sekali riset yang secara empiris dapat membuktikan bahwa disiplin ilmu ini penting untuk melihat hubungan antara negara dan penyelenggara pendidikan.

Karena itu pada tahun 1992, Sergiovanni et al. (1992) mulai mencoba mengidentifikasi interaksi nilai dengan akar konflik yang menyangkut kebijakan pendidikan. Begitu juga dengan Norton et al. (1996) yang mencoba menguji interaksi politik dengan sistem nilai yang anut dunia pendidikan. Sedangkan Marshall et al. (1989) melengkepi riset di bidang interaksi nilai dengan kebijakan publik seperti pendidikan. Marshall bersama dengan kolega-koleganya mencoba menguji status kebijakan pendidikan pada 6 negara bagian di Amerika dan memperlihatkan bahwa variasi pengambilan kebijakan pendidikan sangat berhubungan dengan ketidakharmonisan orientasi nilai. Menanggapi hasil riset Marshal, Mitchell and Wirt

(1985) menambahkan bahwa "There are distinctive cultures in each state policy making setting. Policy makers are socialized in these cultures and share understandings about what is right and proper" (p. 90). Budaya politik, dengan demikian, menawarkan bagaimana para pengambil kebijakan di bidang program sosial termasuk pendidikan sesungguhnya dilingkupi oleh seperangkat nilainilai spesifik yang melatarbelakangi pandangan mereka ketika menetapkan sebuah kebijakan. Nilainilai tersebut itulah yang kemudian mendapatkan perhatian serius untuk dikaji dalam dinamika hubungan kebijakan publik bidang pendidikan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Marshall et al. (1989); Norton et al. (1996); and Sergiovanni et al. (1992) kesemuanya mencoba mengidentifikasi 4 sumber nilai yang dianggap sangat fundamental dan berhubungan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu: Pilihan (choice), kualitas (quality), efisiensi (efficiency) dan kesamaan (equity).

Dengan menggunakan definisi perilaku yang dibuat oleh Marshall et al, pilihan (choice) adalah sebuah nilai yang mengandung opsi untuk seperangkat aksi seperti mandat negara untuk menentukan jenis pendidikan yang ingin diselenggarakan. Dalam kasus Indonesia, pilihan tentang sekolah umum dan sekolah agama (madrasah) adalah persoalan pilihan yang seharusnya didiskusikan sebagai wacana publik. Sama halnya seperti di Amerika ketika orang berdiskusi atau membahas ranah pendidikan mereka menjadi public dan pivate sector. Dalam hal pilihan, nilai ini seharusnya menjadi pegangan bagi masyarakat untuk menggunakan atau menolak gagasan soal pilihan ini.

Nilai kedua, yaitu kualitas adalah sesuatu yang terbaik (the best) dalam konteks kebijakan publik berarti harus sesuai dengan pandangan dan harapan publik itu sendiri. Dalam kasus Indonesia, jika kualitas pendidikan berarti meningkatkan taraf hidup masyarakat (misal), maka proficiency dari kualitas harus sepenuhnya difasilitasi oleh negara dengan cara bagaimana negara menyediakan sumberdaya yang bisa mendukung ke arah kualitas tersebut.

Menyangkut efisiensi, nilai ini dapat didefinisikan baik dari sudut pandang ilmu ekonomi maupun akuntabilitas. Dari segi ekonomis efisiensi berarti bahwa pendidikan harus bernilai efisien dari segi pembiayaan. Sedangkan dalam kerangka akuntabilitas, efisiensi berarti membutuhkan struktur organisasi birokrasi yang bersih (good governance) baik pada

tingkat sekolah ataupun masyarakat. Sistem kontrol yang bertanggungjawab harus dibuat sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efisien.

Sedangkan nilai terakhir yang biasanya terkait dengan isu tentang kebijakan publik di bidang pendidikan adalah kesamaan atau equity. Dalam dunia kebijakan, kesamaan atau equity biasanya berarti bahwa penggunaan sumberdaya publik didistribusi berdasarkan perbedaan kebutuhan manusia. Di samping itu equity juga biasanya menuntut distribusi prgram yang di desain untuk kebutuhan pendidikan untuk dan dalam rangka menekan kesenjangan (gap) antara normanorma kehidupan sosial dan ketersediaan sarana publik yang memadai atau antara norma dan kebutuhan.

Konflik antara keempat nilai tersebut (choice, quality, efficiency, dan equity) dalam kerangka kebijakan publik di bidang pendidikan memang selalu terjadi. Kesuksesan pembuatan kebijakan akan merefleksikan bagaimana nilai-nilai tersebut misalnya dianut baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif. Dan semua persoalan Politik Pendidikan, menurut hemat Saya, sebenarnya harus dilihat, dianalisis, dipelajari dan direvisi dalam kerangka 4 nilai tersebut. Alasannya

cukup sederhana, yaitu biasanya ketegangan dalam perumusan kebijakan publik dalam bidang pendidikan selalu dan akan terkait dengan 4 nilai tersebut dan bagaimana para pengambil kebijakan baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif selalu dilingkupi oleh budaya, ideologi dan keyakikan bagaimana proses keempat nilai tersebut akan diimplementasikan.

Beberapa Refleksi

Buku Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan yang didiskusikan pada hari ini, menurut hemat Saya, adalah sebuah buku penting dan pembuka jalan baik bagi pengamat, praktisi dan ilmuwan serta kalangan birokrat yang tertarik melihat dinamika hubungan antara kebijakan publik bidang pendidikan dan realisasi penyelenggaraan pendidikan. Jelas sekali terlihat keinginan penulis untuk membantu kita melihat bagaimana hubungan antara politik dan pendidikan. Buku ini cukup kuat sebagai "introduction to politics of education" tetapi tidak cukup signifikan merumuskan kasus-kasus "politik pendidikan" yang khas Indonesia. Maksud Saya, buku ini memang tidak seharusnya meneliti secara khusus kasus, misalnya,

bagaimana kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia di jalankan.

Dari 9 bab yang ada dalam buku ini, terlihat ada bab-bab yang dalam hemat Saya terkesan "melompat" dari pembahasan. Misalnya bab 6 dan 7 tentang voter education dan radio dan pendidikan politik masyarakat terkesan "dipaksakan" untuk diperkenalkan sebagai bagian dari bahasan Politik Pendidikan. Tetapi bab 1 s.d. 3 sudah memuat cukup informasi tentang perlunya kita peduli melihat dinamika hubungan politik dan pendidikan.

Beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan buku ini pada bab 3, 8 dan 9 patut mendapat respon yang positif dari para peneliti dan pemerhati masalah pendidikan. Soal kontrol negara terhadap pendidikan seharusnya bisa kita tindaklanjuti dengan serangkain riset tentang polarisasi hubungan tersebut. Persoalan conflict of interests antara depag dan diknas dalam hal isu desentralisasi pendidikan, Saya kira juga patut untuk dilakukan pelacakan dan riset yang komprehensif untuk mendudukkan persoalan tersebut berdasarkan kondisi aktual masyarakat Indonesia. Hal lain adalah bagaimana Litbang Agama juga bisa mempelopori untuk melakukan riset tentang kebijakan penerapan kurikulum di Indonesia dan dampaknya terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia dewasa ini.

Studi tentang kurikulum menurut Saya merupakan bagian yang sangat dinanti karena dari sanalah sesungguhnya kita bisa melihat bagaimana pendidikan sesungguhnya tidak bisa menghindar dari 4 nilai seperti Saya sebutkan di atas. Kebijakan publik soal kurikulum, sepengetahuan Saya, belum pernah diuii secara historis dasar logika penerapannya. Kecuali kurikulum agama yang selalu membuat "emosi" kita pecah tak karuan, riset secara komprehensip tentang kebijakan kurikulum pendidikan Indonesia perlu dikaji secara serius. Alasan cukup sederhana, yaitu bahwa Saya memandang bahwa penerapan kurikulum pendidkkan kita di Indonesia juga sama dengan negara manapun di dunia, yaitu sebagai "an assemblage of competing doctrines and practices" (Beyer and Apple: 1998).

Terakhir, Saya kira kita memerlukan lebih banyak buku soal Politik Pendidikan dalam bentuk yang lain, terutama kajian yang secara langsung melihat desain teknis pendidikan dengan kebijakan publik. Jika selama ini kita melihat bahwa kekuatan pengambilan kebijakan publik hanya ada pada eksekutif dan legeslatif, sudah saatnya juga kita berpikir untuk membuat lembaga-lembaga non-

pemerintah yang kuat sebagai "pressure group" terhadap masalah pendidikan dan perorangan yang kuat dan dapat berperan sebagai "lobbyist". Semakin banyak lembaga dan perorangan terlibat dalam urusan public policy, maka akan semakin baik kualitas pendidikan di Indonesia.[]

DAFTAR PUSTAKA

Benham, M.K.P., & Heck, R.H. (1994).
Political culture and policy in the state controlled educational system:
The case of educational politics in Hawaii. Educational Administration Quarterly, 30(4),419-450.

Dye, T. R. (1972). *Understanding public policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Easton, D. (1953). *The political system*. New York: Knopf.

Easton, D. (1965). A system analysis of political life. New York: Wiley.

Guthrie, J. W., Garms, W. I., & Pierce, L. C. (1988). School finance and education policy: Enhancing educational efficiency, equality and choice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Marshall, C., Mitchell, D., & Wirt, F. (1985). Influence, power and policy making. *Peabody Journal of Education*, 62(4), pp. 7-115.

- Marshall, C., Mitchell, D., & Wirt, F. (1989). Culture and education policy in the American states. New York: The Falmer Press.
- Sergiovanni, T. J., Burlingame, M., Coombs, F. S., & Thurston, P. W. (1992). Educational governance and administration (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
- Timar, T. B., & Guthrie, J. W. (1980). Public values and public school

- policy in the 1980's. *Educational Leadership*, 38(2). pp. 112-115.
- Wirt, F.M., & Kirst, M. W. (1989). The politics of education: Schools in conflict (2nd ed.). Berkeley, CA: McCutchan.
- Beyer, E. Landon and Apple, Michael W. (1998). *The Curriculum: Problems, Politics, and Possibilities* (second edition)